



Reconstruction of Economic Policies in Islamic Education Based on Pesantren Self-Reliance in the Society 5.0 Era

Linda Nevia Sari^{*1}, Lukman Asha², Fakhruddin³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

lindaneviasari.mhs@iaincurup.ac.id, asha.lukman@gmail.com, fakhruddin@iaincurup.ac.id

ABSTRACT

Technological advancements in the era of Society 5.0 present new challenges for the world of Islamic education, particularly for pesantren, which have long been known for their independence. Pesantren not only function as religious education institutions but also have significant potential as a foundation for strengthening the economic empowerment of the community. This study aims to explore and formulate the direction of the reconstruction of Islamic education economic policies that can strengthen the independence of pesantren in facing the dynamics of the digital society. Using a qualitative approach through library research, this article examines various relevant concepts and policies, as well as the potential integration of pesantren values with technological developments. The analysis shows that the independence of pesantren can be strengthened through the development of entrepreneurship among students, the digitalization of pesantren business units, and strategic collaboration with various stakeholders. This policy reconstruction, which focuses on economic independence, is expected to encourage pesantren to become adaptive and contributive institutions in national development based on Islamic values.

Keywords: Pesantren, economic policy, Islamic education, independence, Society 5.0

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat global kini memasuki fase baru yang dikenal sebagai Society 5.0. Istilah ini merujuk pada integrasi teknologi canggih dengan kehidupan sosial secara menyeluruh, di mana manusia menjadi pusat pengembangan inovasi dan nilai. Konsep ini menuntut respons cepat dari berbagai sektor, termasuk pendidikan Islam, khususnya pesantren yang memiliki ciri khas pendidikan berbasis nilai spiritual dan sosial.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam, telah lama memainkan peran strategis dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Namun demikian, dalam era Society 5.0, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran ilmu agama, pesantren dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi informasi serta memiliki daya saing di bidang ekonomi. Situasi ini mendorong urgensi penguatan kemandirian ekonomi pesantren agar tetap eksis dan berdampak luas.

Sejauh ini, beberapa pesantren telah berhasil membangun unit-unit usaha sebagai upaya pemberdayaan ekonomi, seperti koperasi santri, pertanian terpadu, dan usaha makanan halal. Namun, sebagian besar masih bergantung pada dukungan eksternal atau belum memiliki pola usaha yang berkelanjutan. Perlu ada perumusan kebijakan yang komprehensif untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan mendorong potensi pesantren menjadi lebih optimal (Fakhruddin, 2022).

Tidak dapat dipungkiri bahwa transformasi digital memengaruhi pola interaksi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pesantren, yang umumnya berbasis komunitas lokal, seringkali mengalami keterbatasan dalam akses teknologi dan kapasitas sumber daya manusia. Padahal, untuk bisa bertahan di era digital, kemampuan dalam mengelola informasi dan membangun ekosistem ekonomi berbasis teknologi menjadi sangat penting.

Kemandirian ekonomi pesantren juga berkaitan erat dengan kemampuan manajerial. Dalam banyak kasus, pengelolaan unit usaha di lingkungan pesantren masih dilakukan secara konvensional dan belum terintegrasi dengan sistem informasi modern. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan lemahnya daya saing produk pesantren di pasar terbuka (Kemenag, 2021). Oleh sebab itu, pembenahan struktur manajemen ekonomi pesantren menjadi hal yang mendesak.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan Islam belum sepenuhnya menysasar aspek ekonomi pesantren secara holistik. Masih banyak program yang bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang berbasis pada pemetaan kebutuhan lokal, partisipatif, dan kolaboratif menjadi kebutuhan mutlak dalam konteks rekonstruksi ekonomi pendidikan Islam (Asha, 2023).

Penguatan ekonomi pesantren akan memberikan dampak ganda. Selain memperkuat kelembagaan pesantren, hal ini juga mampu menciptakan efek sosial yang lebih luas, seperti penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan pengurangan angka kemiskinan. Dengan demikian, pesantren dapat mengambil bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional secara mandiri dan berkeadilan (Rifa'i, 2022).

Lebih lanjut, pesantren yang kuat secara ekonomi akan memiliki kebebasan dalam menyelenggarakan program-program pendidikan alternatif yang tidak hanya fokus pada aspek keilmuan agama, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup yang sesuai dengan tantangan zaman. Ini merupakan bentuk kontribusi nyata pesantren dalam menyiapkan generasi Islam yang tidak hanya alim, tetapi juga adaptif dan produktif (Sugiyono, 2019).

Sebagai lembaga yang tumbuh dari masyarakat, pesantren memiliki modal sosial yang kuat berupa kepercayaan publik dan jaringan alumni. Potensi ini sangat mungkin untuk dioptimalkan dalam pengembangan ekonomi, baik melalui donasi produktif, filantropi Islam, maupun kemitraan usaha berbasis komunitas. Namun, perlu dibangun sistem regulasi internal yang akuntabel agar potensi tersebut dapat dikelola secara maksimal (Sahib, 2020).

Akhirnya, rekonstruksi kebijakan ekonomi pendidikan Islam berbasis kemandirian pesantren bukanlah sebuah gagasan yang terpisah dari semangat pendidikan Islam itu sendiri. Justru hal ini menjadi refleksi dari ajaran Islam tentang pentingnya kemandirian, keadilan ekonomi, dan pemberdayaan umat (Syamsudin, 2022). Oleh karena itu, pengembangan ekonomi pesantren bukan hanya soal teknis manajerial, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menelaah konsep-konsep, teori, dan kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi pendidikan Islam dan kemandirian pesantren di era Society 5.0. Sumber data utama berasal dari literatur akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, kebijakan pemerintah, dan laporan penelitian sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah secara sistematis berbagai dokumen yang relevan, baik dalam bahasa Indonesia maupun sumber internasional. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji makna, konteks, dan kecenderungan wacana dalam literatur yang diteliti. Validitas data diperoleh melalui

triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber yang berbeda untuk memperkuat keabsahan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi kebijakan ekonomi pendidikan Islam merupakan langkah strategis yang tidak dapat dilepaskan dari karakteristik khas pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas, fleksibel, serta memiliki jaringan sosial yang kuat. Dalam menghadapi era Society 5.0 yang menekankan integrasi antara teknologi digital dan nilai-nilai kemanusiaan, pesantren dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui pendekatan yang relevan dan kontekstual. Salah satu pendekatan tersebut ialah penguatan kewirausahaan santri, yang tidak hanya sekadar menanamkan semangat berwirausaha, tetapi juga dilakukan melalui integrasi dalam kurikulum pendidikan, pelatihan keterampilan yang aplikatif, serta pengalaman langsung dalam unit usaha pesantren. Kewirausahaan ini dirancang agar selaras dengan nilai-nilai Islam serta disesuaikan dengan potensi lokal, sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Anwar, 2020).

Di samping itu, transformasi digital dalam pengelolaan unit usaha pesantren menjadi kebutuhan mendesak. Teknologi informasi seperti platform e-commerce, media sosial, serta sistem keuangan digital menawarkan peluang besar bagi pesantren untuk memperluas jaringan pasar, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengelola keuangan secara lebih akuntabel (Badan Wakaf Nasional, 2021). Oleh karena itu, penguatan literasi digital bagi santri maupun pengelola pesantren menjadi hal yang mutlak agar mereka mampu bersaing di tengah arus ekonomi digital yang sangat dinamis. Namun, kemajuan teknologi saja tidak cukup. Pesantren juga perlu membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, maupun organisasi non-pemerintah. Kerja sama ini dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, akses permodalan, maupun dukungan jaringan distribusi produk pesantren.

Lebih dari itu, penguatan program kemandirian ekonomi seyogianya menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di pesantren. Pendidikan tidak semata-mata dipahami sebagai transfer ilmu, melainkan juga sebagai proses pembentukan karakter dan kemandirian. Santri perlu diberikan ruang untuk mengalami dan mempraktikkan langsung pengelolaan usaha dalam konteks dunia nyata. Melalui pendekatan ini, pesantren tidak hanya mencetak lulusan yang saleh, tetapi juga tangguh secara ekonomi. Guna mendukung program ini, penguatan kapasitas manajerial bagi pengelola pesantren sangat penting. Tidak sedikit usaha pesantren yang gagal berkembang bukan karena minimnya ide, tetapi karena lemahnya kemampuan manajemen (Basri, Hasan, 2022). Oleh karena itu, pelatihan manajemen berbasis nilai-nilai syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi pesantren.

Aspek legalitas juga menjadi isu yang sering diabaikan. Banyak pesantren yang telah memiliki unit usaha produktif, namun belum memiliki badan hukum yang sah. Ketiadaan legalitas ini menjadi kendala saat pesantren ingin mengakses pendanaan, bantuan pemerintah, maupun membangun kemitraan usaha (Yusuf, Muhammad, 2021). Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang memfasilitasi proses legalisasi usaha pesantren secara cepat dan mudah. Dalam hal pendanaan, optimalisasi dana zakat, infaq, dan wakaf untuk mendukung kegiatan ekonomi pesantren juga menjadi strategi yang potensial. Apabila dikelola secara produktif dan profesional, dana sosial keagamaan ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi pesantren yang kuat dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga yang hidup di tengah masyarakat, pesantren berpeluang besar untuk menjadi episentrum ekonomi lokal. Dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam rantai produksi, distribusi, hingga konsumsi, pesantren dapat membentuk ekosistem ekonomi yang

inklusif dan memberdayakan. Langkah ini sekaligus memperkuat hubungan sosial antara pesantren dan komunitas sekitarnya. Dalam kerangka penumbuhan jiwa kewirausahaan sejak dini, pesantren dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kreatif seperti market day, bazar, dan simulasi bisnis yang melatih santri agar mampu merintis usaha secara mandiri. Melalui proses ini, terbentuk generasi santri yang tidak hanya cakap dalam ilmu agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan ekonomi.

Peran negara dalam rekonstruksi kebijakan ekonomi pendidikan Islam tidak boleh bersifat pasif. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang inklusif dan memberi afirmasi kepada pesantren yang mengembangkan unit usaha produktif. Bentuk afirmasi tersebut dapat berupa insentif pajak, subsidi, maupun kemudahan akses pembiayaan mikro. Langkah ini menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap lembaga pendidikan Islam yang selama ini berperan besar dalam pembangunan karakter bangsa (Lutfi, Ahmad, 2022). Selain itu, penting untuk mendorong terciptanya budaya inovatif di lingkungan pesantren. Inovasi dalam pengembangan produk, model bisnis, dan strategi pemasaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa usaha pesantren mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar.

Alumni pesantren juga memegang peranan penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Mereka dapat berperan sebagai mentor, investor, maupun mitra usaha yang turut membangun jaringan bisnis pesantren. Selain itu, keberhasilan pesantren dalam membangun usaha mandiri perlu didokumentasikan dan disebarluaskan. Dokumentasi tersebut akan menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi pesantren lain yang tengah berupaya membangun kemandirian ekonomi. Dalam konteks kerja sama antarpesantren, pembentukan konsorsium bisnis menjadi pilihan strategis untuk memperluas skala produksi dan jangkauan pasar. Konsolidasi potensi ini akan memperkuat posisi tawar pesantren di tingkat nasional (Nawawi, Ismail, 2022).

Terakhir, sinergi antara pesantren dan dunia industri juga perlu diperkuat. Dunia industri dapat menjadi tempat pembelajaran langsung bagi santri melalui program magang atau kerja sama produksi. Dengan pengalaman tersebut, santri akan memiliki bekal nyata untuk menghadapi dunia kerja atau bahkan merintis usaha sendiri. Secara keseluruhan, rekonstruksi kebijakan ekonomi pendidikan Islam menuntut keterlibatan aktif semua pihak. Tidak cukup dengan pendekatan teknokratis semata, tetapi harus dibangun dengan visi bersama, regulasi yang responsif, dan komitmen untuk menghadirkan keadilan, pemberdayaan, serta keberlanjutan dalam pengelolaan ekonomi pesantren. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pembinaan moral dan spiritual, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi umat di era digital yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Rekonstruksi kebijakan ekonomi pendidikan Islam berbasis kemandirian pesantren di era Society 5.0 merupakan keniscayaan yang harus segera direspon secara sistematis dan partisipatif. Pesantren memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi umat melalui unit-unit usaha yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan akses teknologi, kapasitas manajerial, dan dukungan kebijakan yang memadai. Era Society 5.0 menuntut pesantren untuk tidak hanya menjadi pusat pendidikan spiritual, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan digital. Upaya rekonstruksi kebijakan harus mencakup penguatan kewirausahaan santri, digitalisasi unit usaha pesantren, peningkatan kapasitas manajerial, serta kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Selain itu, integrasi program kemandirian ekonomi ke dalam kurikulum pesantren menjadi kunci agar transformasi ini bersifat berkelanjutan dan berakar kuat dalam kultur pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2022). *Pendekatan Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Pesantren*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya.
- Anwar, M. "Manajemen Usaha Pesantren dan Tantangannya." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 1, 2020.
- Asha, L. (2023). *Pesantren sebagai Agent of Change: Peran Ekonomi Pesantren dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. "Panduan Legalitas Usaha Pesantren." Jakarta, 2021.
- Basri, Hasan. *Wakaf Produktif untuk Kemandirian Ekonomi Umat*. Jakarta: KNEKS, 2022.
- Fakhrudin, I. (2022). *Manajemen Pendidikan Islam: Transformasi dan Inovasi di Era Digital*. Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Fauzi, R. (2021). *Kerjasama antara Pesantren dan Sektor Swasta dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 23-41.
- Harmi, H. (2021). *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dalam Era Digital*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2), 45-59.
- Hasan, M. (2020). *Inovasi Pendidikan Islam di Pesantren: Membangun Kemandirian Ekonomi dan Sosial*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Kemenag RI. (2021). *Laporan Tahunan Pengembangan Pesantren dan Program Ekonomi Pesantren*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI. *Rencana Induk Pengembangan Pesantren 2020–2024*. Jakarta, 2020.
- Lubis, A. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui Pendekatan Partisipatif: Studi Kasus Pesantren di Jawa Tengah*. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Islam*, 9(3), 112-130.
- Luthfi, Ahmad. "Simulasi Bisnis sebagai Metode Pembelajaran di Pesantren." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 2, 2022.
- Nawawi, Ismail. "Peran Alumni dalam Penguatan Ekonomi Pesantren." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 2, 2020.
- Rahman, T. (2023). *Digitalisasi Pesantren: Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Ekonomi Pesantren*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rifai, F. (2022). *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Model-Model Pemberdayaan Pesantren dalam Menanggulangi Kemiskinan*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Sahid, R. (2020). *Membangun Pesantren yang Mandiri: Perspektif Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Gama Press.
- Sugiyono, A. (2019). *Peran Pesantren dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 13(4), 17-29.
- Supriyanto, Agus. "Best Practice Ekonomi Pesantren: Studi Kasus Pesantren Al-Ittifaq." *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 6, no. 2, 2021.
- Syamsuddin, Z. (2022). *Paradigma Kemandirian Ekonomi Pesantren dalam Perspektif Pendidikan Islam*. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam*, 15(2), 85-98.
- Yusuf, B. (2021). *Pengelolaan Usaha Ekonomi di Pesantren: Studi Kasus di Pesantren Modern*. Bandung: Penerbit Al-Mizan.
- Yusuf, Muhammad. "Pesantren dan Pembangunan Ekonomi Lokal." *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 2, 2021.